

MEISSIE PHOLUAN, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KANTOR : Jl. Tanah Abang I No. 9B, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3805640, 68680717

Fax. (021) 3847653

HP 0816 4857108

KEP. MEN. KEH. & HAM NO. C - 91 HT.03.02-Th.2003 TGL. 27 - 01 - 2003

GROSE

Salinan/Turunan

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

PT SAMSON KARYA SEJANTERA

Tgl. **07 November 2024** No. **22,-**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SAMSON KARYA SEJAHTERA

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-11-2024 (tujuh -----
November tahun duaribu duapuluh empat). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **MEISSIE PHOLUAN, Sarjana -----
Hukum**, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada ---
bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh Saya ----
Notaris : -----

1. -Tuan **SAMUEL SUPRAYITNO**, lahir di Magetan, tanggal
empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
(04-03-1973), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Limus
Pratama Regency E.15/29, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 011, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan -----
Cileungsi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----
3201070403730007; -----

2. -Nyonya **ENNY WIDIYAWATI, Sarjana Ekonomi**, lahir di
Yogyakarta, tanggal dua belas Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-10-1978), --
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Bogor, Limus Pratama Regency E.15/29,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan ----
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 3201075210780007;-----



3. -Tuan **YEHEZKIEL ADHI NUGRAHA**, lahir di Magetan, ---
tanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga (20-06-1993), Warga Negara ----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Magetan, Sumberejo, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 002, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan ---
Maospati, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3520112006930003;-----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta;-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan
identitasnya. -----

-Para penghadap tersebut diatas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari -
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk --
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -----
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam -
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

-----**PT. SAMSON KARYA SEJANTERA**-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----

disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di-----

KABUPATEN BOGOR. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan,-----

baik didalam maupun diluar wilayah Republik-----

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,

dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Aktivitas Jasa --

Penunjang Pertambangan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut : -----

- Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan, yang ----

meliputi :-----

AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

LAINNYA (09900), Kelompok ini mencakup jasa

penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak,

yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan

golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa

eksplorasi misalnya dengan cara tradisional

seperti mengambil contoh bijih dan membuat

observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran

hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan

pengeboran ladang atau sumur tambang.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 1.000
(seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya -
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) --
oleh pemegang saham yang telah mengambil bagian ---
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang --
disebutkan pada akhir akta. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-----
saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau-----
badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham,-
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk-----
setiap surat saham diberi sehelai surat saham. ----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-----

kurangnya ;-----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----

sekurang kurangnya ; -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh Direksi -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat-----

dipakai, atas permintaan mereka yang-----

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham---

pengganti, setelah surat saham yang rusak atau-----

tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali----

kepada direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----

harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----

Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-

Saham berikutnya. -----

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan-----

mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan---

- surat saham pengganti setelah menurut pendapat-----
direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan---
disertai dengan jaminan yang dipandang perlu oleh---
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat---
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat-
(2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif---
saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----
peraturan perundang undangan mensyaratkan hal-----

tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak-----

diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----

lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara --

Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam---

jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum--

yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas-----

sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan--

hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran dasar. -

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam --

Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum-----

Pemegang Saham Luar Biasa -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran

Dasar ini berarti keduanya, yaitu : -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum---

Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas-

ditentukan lain. -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan: -----

-Laporan tahunan yang telah di telaah oleh Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham; -----

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----

Rapat Umum Pemegang Saham; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal perseroan

mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum --

Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana -

mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran

Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan

keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi---

atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan--

Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----

diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat

-- (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan-----

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.---

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----

kedudukan Perseroan. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan
dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak-----
diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan
semua menyetujui agenda rapat dan keputusan-----
disetujui dengan suara bulat; -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur---
Utama. Selain itu sebagai alternative lain Rapat --
Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris -
Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota direksi; -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang-
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan----
Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak----

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum---
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih--
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. --

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan---
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah-----
dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----
ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain-----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang----
Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, --
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur,-
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai----

Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan-----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai-----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-
bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar----
negeri; -----
-Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka --
Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam

Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----

setiap waktu : -----

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -

anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari dua orang atau ----

lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili-

1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah----

seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama

Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar -

ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat --

Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)---

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal

rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----

waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua

anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-----

- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.--
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam---
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -
anggota Direksi yang dipilih oleh dari antara-----
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau --
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju--
paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari-
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah--- tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan--- semua anggota Direksi telah diberitahu secara----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---- tertulis dengan menandatangani persetujuan----- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----- Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih---- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----

persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, --
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan-
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini. -----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-
pengunduran dirinya. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu
waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan-
menyebutkan alasannya; -----

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan-----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6)-----
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota --
Dewan Kosmisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Para--
Pemegang Sahamsesuai dengan ketentuan sebagaimana--

dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan ---
Terbatas, -----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -----
diberitahu terlebih dahulu tentang rencana -----
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk -----
membela diri sebelum rencana diambil keputusan ----
pemberhentian. -----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal -
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas-----
pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat--
(5); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan/---
atau Keputusan seluruh pemegang saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan -----
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu ----
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki --
bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan-
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat---

bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan---
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --
oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak ----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap ----
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan-
oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk
sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Direksi -
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak-
mempunyai seorang pun anggota Direksi, dalam hal --
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan--
Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota-----
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku--
pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **Pasal 17** -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas)----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember. -----

Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ---
ditutup. -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan meyediakannya-
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan-
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN**-----

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku-----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang -----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----

dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----
belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum-
tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai -----
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal--
ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %----
(dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi-
keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat--
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi ---
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan -----
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang--
undangan -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal-
4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh--
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para---
pendiri : -----

a.-Tuan **SAMUEL SUPRAYITNO** -----

tersebut, sebesar 600 (enam -
ratus) saham, dengan nilai --
nominal seluruhnya enam -----

ratus juta Rupiah Rp. 600.000.000.-

b.- Nyonya **ENNY WIDIYAWATI**, -----

Sarjana Ekonomi tersebut, -----
300 (tiga ratus) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya -----
sebesar tiga ratus juta -----

Rupiah Rp. 300.000.000.-

c.- Tuan **YEHEZKIEL ADHI NUGRAHA**, -

tersebut, 100 (seratus) saham, -
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar seratus juta -----

Rupiah Rp. 100.000.000.-

-Sehingga seluruhnya berjumlah --

1.000 (seribu) saham dengan ----

Nilai nominal seluruhnya sebesar

satu milyar Rupiah **Rp. 1.000.000.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3)--

dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai---

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan----

Komisaris telah diangkat sebagai : -----

Direktur : Tuan **SAMUEL SUPRAYITNO**,tersebut;

Komisaris Utama : Nyonya **ENNY WIDIYAWATI**, Sarjana

Ekonomi, tersebut;-----

Komisaris : Tuan **YEHEZKIEL ADHI NUGRAHA**,----

tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal

tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **SETYO BUDI PRASTOWO**, lahir di Purworejo, pada ---

tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh

dua (08-07-1972), bertempat tinggal di Kota Bekasi, --

Taman Jatisari Permai Jalan Kuwait Blok EC Nomor 30, -

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan -----

Jatisari, Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Nomor: 3275090807720008;-----

2. Nyonya **SITI HADIYATI**, lahir di Bekasi tanggal tujuh --

belas Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua

(17-02-1992), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -

Kota Bekasi, KP. Pintu Air, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan --
Satria, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3275065702920009; -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada --
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani --
akta ini.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA -

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



(MEISSIE PHOLUAN, SH)



KPP PRATAMA CIBINONG

10.896.458.6-403.000

PT. SAMSON KARYA SEJAHTERA

NPWP16 : 0108 9645 8640 3000



**CLUSTER MONACO BLOK. W1 NO. 61 RT. 001 RW. 015
NAGRAK, GUNUNG PUTRI
KAB. BOGOR JAWA BARAT**

Tanggal Terdaftar 08/11/2024



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npw[✓]p.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan

Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0811240071732

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SAMSON KARYA SEJAHTERA |
| 2. Alamat Kantor | : Cluster Monaco Blok W1 No. 61, Desa/Kelurahan Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 16967 |
| No. Telepon | : 081381314101 |
| Email | : samsonkaryasejahtera@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 November 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0811240071732

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Desa Gunung Kembang, Desa/Kelurahan Gunung Kembang, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 31473	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

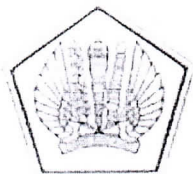
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP PRATAMA CIBINONG

JL. AMAN 1 KOMP. PEMDA KAB. BOGOR, CIBINONG
TELEPON 021-8762985, 8753885 FAKSIMILE 021-8753883 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-40116/KT/KPP.330703/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa .

- | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | Nama | · PT. SAMSON KARYA SEJAHTERA |
| 2 | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 108964586403000 |
| 3 | NPWP 16 digit | 0108 9645 8640 3000 |
| 4 | NITKU | . 0108964586403000000000 |
| 5 | Kategori | Badan |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 8 November 2024 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM,
- melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Cibinong, 8 November 2024

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800382105856

Arif Faudji

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

* Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PT. SAMSON KARYA SEJAHTERA

Office : Cluster Monaco Blok W1 No.61 Kotawisata – Cibubur
Workshop : Jl. Raya Narogong Pangkalan 2 Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat Phone : (+62) 8138 1314 101, Email:
samuel.adinata@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Suprayitno

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT SAMSON KARYA SEJAHTERA

Alamat : Office – Cluster Monaco Blok W1 no. 61 Kotawisata – Cibubur

Workshop – Jl. Raya Narogong Pangkalan 2, Bantar Gebang - Bekasi

Telepon/Fax : 0813 8131 4101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak berdasarkan surat izin usaha jasa penyewaan mesin crusher batubara
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung Jawab

Bekasi, 20 Januari 2025



(Samuel Suprayitno)
DIREKTUR

LAMPIRAN :

Kualifikasi Penyedia Jasa (wajib dikirimkan bersamaan dengan Proposal Penawaran)

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan Dokumen			File
		Asli	Copy	Tidak Ada	
1	Surat penawaran harga yang di tanda tangani pejabat berwenang dan disertakan materai Rp 10.000,-	OK	OK		Ada di Proposal
2	Fotocopy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terbaru (jika ada)	OK	OK		Sudah ada
3	Fotocopy NPWP atas nama perusahaan yang masih berlaku	OK	OK		Sudah ada
4	Fotocopy TDP yang masih berlaku	OK	OK		Jadi satu dgn NIB
5	Fotocopy SKDP yang masih berlaku	OK	OK		SK Domisili
6	Fotocopy NIB/SIUP yang masih berlaku	OK	OK		Sudah ada
7	Fotocopy SKT yang masih berlaku	OK	OK		Sudah ada
8	Fotocopy SPPKP yang masih berlaku	OK	OK		Penguhan PKP
9	Rangkuman pengalaman perusahaan, dijelaskan detail tahun, perusahaan, lokasi.	OK	OK		Ada di Proposal
10	IUJP yang berlaku tentang pengolahan batubara	ON PROCESS	ON PROCESS		Menyusul
12	Memberikan gambar design alat yang digunakan	OK	OK		Sudah ada
13	Memberikan timeline delivery alat yang digunakan	OK	OK		Sudah ada
14	Surat keterangan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan; tidak bangkrut; kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.	OK	OK		Sudah ada
15	Surat keterangan tidak sedang dalam masalah pembayaran Pajak ataupun yang berkaitan dengan Pajak lainnya.	OK	OK		Surat yang dibuat bersangkutan dengan MIP dan SKS
16	Surat Pernyataan setuju atas term dan condition yang tercantum di IKPT dan MoM atas meeting Aanwijzing ini	OK	OK		Surat yang dibuat bersangkutan dengan MIP dan SKS

CHECK LIST DOKUMEN PENAWARAN

Note: Mohon agar dapat diberikan tanda (√) pada kolom kelengkapan dokumen